



**KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA INDONESIA
DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI BERDASARKAN
PRINSIP KESANTUNAN *LEECH***

SKRIPSI

Oleh :

Iwan Fahmi

100210402046

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA INDONESIA
DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI BERDASARKAN
PRINSIP KESANTUNAN *LEECH***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

Iwan Fahmi

100210402046

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

MOTO

"Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya."

(Cherterfield)

*) <http://www.maribelajarbkk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hasil jerih payah saya selama 5 tahun kuliah. Skripsi ini tercipta karena kuasa Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan berbangga hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Para orang tuaku, Ibuku tercinta Aminah dan Ayah Sugianto yang senantiasa mencurahkan segala jerih payah dan kasih sayangnya kepada ananda;
2. guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam menjalani kehidupan;
3. almamater yang kubanggakan, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Fahmi

NIM : 100210402046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Paripurna DPR RI Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Januari 2016

Yang menyatakan

Iwan Fahmi

100210402046

HALAMAN PENGAJUAN
KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA INDONESIA
DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI
BERDASARKAN PRINSIP KESANTUNAN LEECH
SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan tim penguji
guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Oleh

Nama Mahasiswa	: Iwan Fahmi
NIM	: 100210402046
Angkatan Tahun	: 2010
Tempat Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 03 September 1991
Jurusan	: Pendidikan Bahasa dan Seni
Program Studi	: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. Mujiman Rus Andianto
NIP 19570713 198303 1 004

Anita Widjajanti, S.S., M. Pd.
NIP 19710402 200501 2 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Paripurna DPR RI Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech” telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember dan dinyatakan lulus pada :

hari : Jumat
tanggal : 20 November 2015
tempat : Ruang 35D-106

Tim Penguji

Ketua,

Furoidatul Husniah, S. S., M. Pd.
NIP 19790207 200812 2 002

Sekretaris,

Anita Widajanti, S.S., M. Hum.
NIP 19710402 200501 2 002

Anggota I,

Rusdhianti Wuryaningrum, S. Pd., M.Pd.
NIP 19780506 200312 2 001

Anggota II,

Drs. Mujiman Rus A., M.Pd.
NIP 19570713 198303 1 004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jember

Prof. Dr. Sunardi, M. Pd.

NIP 19540501 1983 031 005

RINGKASAN

Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Paripurna Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech; Iwan Fahmi; 100210402046; 2015; 98 halaman; Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Kesantunan berbahasa ada di setiap situasi tutur, termasuk situasi tutur dalam sidang Paripurna DPR RI. Pada situasi tutur tersebut, ditemui tindak tutur tidak santun yang terindikisi melanggar prinsip kesantunan Leech. Tindak tutur tidak santun tersebut termanifestasikan ke dalam prinsip kesantunan Leech. Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah penelitian ini ialah: 1) bagaimanakah realisasi ketidaksantunan berbahasa Indonesia berdasarkan prinsip kesantunan Leech? dan 2) bagaimanakah efek ketidaksantunan berbahasa Indonesia yang ditimbulkan dalam sidang Paripurna DPR RI?

Rancangan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini berupa tindak tutur dari para peserta pertuturan yang ada dalam sidang Paripurna DPR RI yang diindikasikan tidak santun. Sumber data penelitian berupa tindak tutur dari para peserta pertuturan yang terdapat dalam cuplikan video rekaman sidang Paripurna DPR RI yang diunduh dari *youTube*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak catat. Proses analisis data dalam penelitian ini terdiri dari: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan.

Pada sidang Paripurna DPR RI terdapat tuturan yang melanggar ketiga maksim-maksim berikut: 1) pelanggaran maksim pujian terjadi karena, tuturan salah seorang anggota dewan KIH mengandung pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang memaksimalkan cacian kepada pimpinan sidang; 2) pelanggaran maksim keraifan terjadi, karena tuturan pimpinan sidang mengandung pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang memaksimalkan kerugian kepada orang lain atau anggota sidang lainnya; 3) pelanggaran maksim kesepakatan terjadi,

karena salah seorang anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminimalkan kesepakatan dengan pimpinan sidang.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang paripurna DPR RI menimbulkan efek di dalam persidangan paripurna tersebut. Efek yang ditimbulkan ialah sebagai berikut:

- 1) Efek pengabaian tidak merespon ditunjukkan oleh pimpinan sidang kepada salah seorang anggota dewan dari PDI-P mengenai apa yang dituturkan kepada dirinya;
- 2) efek mendebat terjadi ketika salah seorang anggota dewan dari PKB mengkritisi jalannya persidangan;
- 3) Efek pengolok-olokan di persidangan dialami oleh pimpinan sidang saat mempersilahkan partai Hanura untuk *walk out* dari persidangan;
- 4) Efek memprotes di persidangan dilakukan oleh salah seorang anggota dewan dari PDI-P kepada pimpinan sidang.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan: 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif referensi dalam ilmu pragmatik. Khususnya materi ketidaksantunan berbahasa Indonesia berdasarkan prinsip kesantunan Leech; 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan satu referensi untuk mengkaji aspek ketidaksantunan berbahasa lainnya yang belum diteliti oleh peneliti, ketidaksantunan pada objek penelitian lain dengan menggunakan teori kesantunan yang berbeda; 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk menerapkan kesantunan ke dalam materi dan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi yang berjudul “Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Paripurna DPR RI Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Seni, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- 1) Drs. Moh. Hasan, M.Sc., PhD. selaku Rektor Universitas Jember;
- 2) Prof. Dr. Sunardi, M.Pd. selaku Dekan FKIP Universitas Jember;
- 3) Dr. Arju Mutiah, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni;
- 4) Rusdhianti Wuryaningrum, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- 5) Drs. Mujiman Rus Andianto, M.Pd. selaku dosen pembimbing I dan Anita Widjajanti, S.S., M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
- 6) segenap dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dengan sabar memberikan ilmu dan pengalamannya.
- 7) kepada Ibuku tersayang dan juga adikku yang telah menjadi motivasi dalam penulisan skripsi ini;
- 8) teman-teman Naga Hitam, lek Naufal, lek Fahmi, S.Pd. cha Halis S.Pd. Yoga S.Pd. cak Kardi, nom Erpan, nom Agung, terima kasih telah menjadi motivasi buat saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

- 9) sahabat-sahabatku, nom Alex, nom Agung, nom Deyet, cak Kardi, nom Reza 'bypass', bos aldi yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 10) rekan-rekan IMABINA angkatan 2010 yang banyak memberikan kenangan indah selama kuliah;
- 11) semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Jember, 08 Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGAJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Definisi Operasional	6
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Kesantunan Berbahasa	8
2.2 Prinsip Kesantunan Leech	9
2.2.1 Maksim Kearifan	9
2.2.2 Maksim Kedermawanan	10
2.2.3 Maksim Pujian	11
2.2.4 Maksim Kerendahan Hati	12
2.2.5 Maksim Kesepakatan	12
2.2.6 Maksim Simpati	13

2.3 Wujud Kesantunan Berbahasa	15
2.3.1 Peristiwa Tutur	15
2.3.2 Konteks Tutur	16
2.4 Rapat Paripurna DPR RI 2014-2019.....	17
2.5 Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	18
BAB 3. METODE PENELITIAN	20
3.1 Rancangan Penelitian	20
3.2 Data dan Sumber Data	21
3.3 Metode Pengumpulan Data	21
3.4 Metode Analisis Data	22
3.5 Instrumen Penelitian	25
3.6 Prosedur Penelitian	25
BAB 4. PEMBAHASAN	26
4.1 Tindak Tutur Tidak Santun	26
4.1.1 Ketidaksantunan Akibat Pelanggaran Maksim Pujian	26
4.1.2 Ketidaksantunan Akibat Pelanggaran Maksim Kearifan	32
4.1.3 Ketidaksantunan Akibat Pelanggaran Maksim Kesepakatan	38
4.2 Efek Ketidaksantunan Tindak Tutur	42
4.2.1 Efek Pengabaian Tidak Merespon	42
4.2.2 Efek Mendebat	44
4.2.3 Efek Pengolok-olokan	46
4.2.4 Efek Memprotes	47
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR LAMPIRAN

A.	Matriks Penelitian	52
B.	Tabel Pengumpul Data	53
C.	Tabel Analisis Data	76
D.	Tata Cara Persidangan	90
E.	Autobiografi	98

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional penuturnya karena, di dalam komunikasi penutur dan petutur tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran tetapi tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan. Dalam menyampaikan informasi, seseorang harus memperhatikan atau tunduk pada norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat tempat ia hidup. Jika tatacara berkomunikasi seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya yang ditaati atau dipatuhi, maka orang ini akan mendapatkan nilai negatif dari orang lain misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradab, bahkan tidak berbudaya.

Kesantunan berbahasa tercermin dalam tatacara berkomunikasi lewat unsur verbal. Kesantunan berbahasa secara verbal adalah segala unsur kesantunan yang berkaitan dengan masalah bahasa. Menurut Pranowo (2009: 9), ada beberapa unsur verbal yang menyebabkan kesantunan dalam berbahasa. Unsur-unsur tersebut meliputi pemakaian diksi yang tepat, pemakaian gaya bahasa yang santun, pemakaian struktur bahasa yang baik dan benar, penggunaan pilihan kata honorifik atau sapaan penghormatan, dan panjang pendek tuturan.

Kesantunan berbahasa memiliki kriteria-kriteria kesantunan yang harus ditaati oleh para peserta pertuturan. Kriteria-kriteria tersebut membimbing para peserta pertuturan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, yang terhindar dari kesalahpahaman, dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Banyak para ahli yang mencoba menjelaskan kriteria-kriteria kesantunan dalam berkomunikasi dengan cara menulis teori kesantunan berbahasa. Goffman, Brown, Levinson, dan Leech merupakan salah satu pakar yang merumuskan kriteria-kriteria kesantunan ke dalam teori kesantunan berbahasa.

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tidak ada satu pun teori kesantunan yang dapat secara utuh diterapkan untuk menjelaskan fenomena pemakaian kesantunan bahasa oleh para penutur bahasa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa teori wajah dari Goffman merupakan dasar utama dalam realisasi santun berbahasa. Strategi Kesantunan dari Brown dan Levinson terlihat lebih individualistik sehingga kurang tepat digunakan pada budaya masyarakat timur. Sementara itu, prinsip kesantunan dari Leech jauh lebih komprehensif dan mampu menjelaskan fenomena pemakaian bahasa dalam masyarakat Indonesia.

Leech (1993: 206) merumuskan kriteria-kriteria kesantunan ke dalam prinsip kesantunan yang dijabarkan menjadi 6 maksim. Keenam maksim yang dicetuskan Leech terdiri atas maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Isi dari keenam maksim tersebut memiliki batasan-batasan kesantunan yang jelas sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh para peserta pertuturan dalam berkomunikasi. Prinsip kesantunan Leech juga bersifat universal atau umum karena Leech berpendapat bahwa derajat kesantunan yang dinyatakan oleh seorang penutur akan sangat ditentukan oleh situasi saat berlangsungnya pertuturan sehingga derajat kesantunan tersebut akan berbeda pada setiap latar sosial pertuturan.

Sidang Paripurna pemilihan paket pimpinan DPR RI adalah salah satu latar sosial pertuturan. Rapat paripurna yang mengagendakan pemilihan paket pimpinan DPR RI untuk periode 2014-2019, sempat diskors beberapa waktu karena kericuhan. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan suara antara kubu dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Berbagai media massa, media cetak, dan media elektronik ramai meliput dan memberitakan, sehingga masyarakat dapat menyaksikan proses pertuturan yang terdapat di dalamnya. kericuhan sidang paripurna DPR RI menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat karena menyangkut masalah yang sensitif yaitu pemilihan paket pimpinan DPR RI periode 2014-2019, apalagi yang ricuh di Senayan adalah dua kelompok yang baru saja berkompetisi di dalam pemilihan

presiden republik Indonesia untuk periode 2014-2019 yakni dari kelompok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan kelompok Koalisi Merah Putih (KMP).

Kesantunan berbahasa ada di setiap situasi tutur, termasuk situasi tutur yang ada di dalam sidang Paripurna DPR RI. Tingkat kesantunan di dalam sidang Paripurna DPR RI berbeda dengan tingkat kesantunan dalam masyarakat pada umumnya. Hal tersebut karena kesantunan berbahasa dipengaruhi oleh situasi tutur sehingga masing-masing situasi tutur memiliki kriteria kesantunan yang berbeda.

“kesantunan bukan merupakan sebuah karakteristik yang melekat kepada sebuah tindakan tetapi dibentuk oleh hubungan interaksi yang didasarkan kepada norma yang diyakini bersama, dibangun, dan diproduksi ulang oleh sekelompok orang di dalam sebuah kelompok sosial” (Reiter dalam Murni, 2009).

Situasi tutur di sidang Paripurna DPR RI merupakan situasi tutur formal sehingga terdapat aturan-aturan yang perlu ditaati oleh para peserta sidang Paripurna DPR RI. Aturan-aturan tersebut mengacu kepada undang-undang dan tata tertib di persidangan Paripurna DPR RI sehingga memengaruhi tingkat kesantunan di dalam persidangan.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang Paripurna DPR RI dapat menimbulkan dampak negatif bagi para peserta pertuturan dan lingkungan di sekitar persidangan. Salah satu dampak negatif tersebut yaitu dapat mengganggu jalannya proses sidang Paripurna. Ketidakharmonisan hubungan antarpeserta tutur juga dapat menjadi dampak lanjutan yang akan terjadi jika tidak memperhatikan kesantunan berbahasa Indonesia di dalam sidang Paripurna DPR RI.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang Paripurna DPR RI, juga dapat memengaruhi cara berbahasa masyarakat yang menyaksikan sidang Paripurna tersebut. Sidang Paripurna yang diliput langsung oleh stasiun televisi baik swasta maupun televisi pemerintah, tentu cukup menjadi perhatian masyarakat. Adanya pejabat negara, yang merupakan panutan dan pimpinan masyarakat, semakin membuat masyarakat tertarik untuk menontonnya. Hal tersebut secara tidak langsung dapat memengaruhi cara berbahasa masyarakat,

khususnya dalam hal kesantunan berbahasa. Pranowo (dalam Chaer, 2010: 73) menyatakan,

“orang yang suka berbicara tidak santun sebaiknya tidak diberi posisi dalam peran publik (seperti ketua RT, anggota DPR dan sebagainya) karena dikhawatirkan akan memengaruhi generasi muda dengan ketidaksantunannya itu”.

Berikut merupakan contoh tuturan yang tidak santun.

1). **“Ini bukan forum nenek dengan cucu, juga bukan forum guru dengan murid”**.

Konteks tuturan:

Dituturkan oleh Dwi Riyawati, seorang anggota DPR dari fraksi PDI-P kepada pimpinan sidang Paripurna DPR, dengan berdiri dan bersuara lantang juga tangan sambil menunjuk-nunjuk ke arah pimpinan sidang.

Koteks:

Pimpinan sidang	:...“sekarang kita lanjut pada agenda ke dua yakni...”
Dwi Riyawati	: “ Interupsi pimpinan, interupsi pimpinan, Interupsi pimpinan yang terhormat. ~~”
Pimpinan sidang	: ” apa lagi yang mau diinterupsi, tadi kan sudah jelas di forum lobi”.

Tindak tutur (1) menunjukkan tindak tutur yang tidak santun karena mengandung pemarah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang memaksimalkan cacian kepada pimpinan sidang paripurna oleh Dwi Riyawati. Dalam tuturannya Dwi Riyawati mengucapkan “ *ini bukan forum nenek dengan cucu*” pernyataan tersebut tidak seharusnya diucapkan dalam sidang paripurna DPR RI oleh peserta sidang paripurna kepada pimpinan sidang paripurna, maupun sesama anggota peserta sidang paripurna. Tindak tutur (1) merupakan cacian kepada pimpinan sidang paripurna karena penggunaan kata “nenek” dikenakan kepada pimpinan sidang paripurna Popong Otje Djunjunan yang merupakan anggota dewan paling tua pada periode 2014-2019.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia yang terdapat dalam sidang Paripurna DPR RI, khususnya sidang Paripurna pemilihan paket pimpinan DPR RI periode 2014-2019, menarik untuk dibahas. Alasannya karena Setiap mengadakan rapat paripurna anggota DPR RI selalu menimbulkan perdebatan-

perdebatan yang panjang, sehingga masyarakat tertarik untuk mengikutinya dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat tindak tutur mana saja yang santun dan tidak santun yang terjadi dalam peristiwa tutur di dalam sidang paripurna DPR RI. Efek yang ditimbulkan dari ketidaksantunan berbahasa Indonesia yang terdapat dalam sidang Paripurna DPR RI juga penting untuk dibahas. Hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam menghindari terjadinya ketidaksantunan berbahasa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berjudul *“Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Paripurna DPR RI Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah realisasi ketidaksantunan berbahasa Indonesia yang terjadi dalam sidang paripurna DPR RI berdasarkan prinsip kesantunan Leech?
- b. Bagaimanakah efek ketidaksantunan berbahasa Indonesia yang ditimbulkan dalam sidang paripurna DPR RI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Memeroleh deskripsi tentang realisasi tuturan yang tidak santun dalam sidang paripurna DPR RI berdasarkan prinsip keantunan Leech.
- b. Memeroleh deskripsi tentang efek ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang paripurna DPR RI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif referensi dalam mata kuliah pragmatik, khususnya materi kesantunan berbahasa berdasarkan prinsip kesantunan Leech.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk mengkaji aspek ketidaksantunan berbahasa lainnya yang belum diteliti oleh peneliti lain.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk bahan pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP kelas IX semester 1, khususnya untuk aspek keterampilan berbicara.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan pengertian khusus terhadap definisi yang digunakan dalam penelitian. Hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca sehingga tidak terjadi kerancuan pemahaman. Istilah-istilah yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip kesantunan Leech adalah motif-motif kesantunan berbahasa yang termanifestasikan dalam maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.
- b. Ketidaksantunan berbahasa adalah kegiatan berkomunikasi dengan orang lain yang melanggar maksim sopan santun Leech yang terdiri dari maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.

- c. Kesantunan berbahasa adalah suatu sikap dan atau tindakan menghargai orang lain yang diekspresikan di dalam bahasa yang digunakan.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian kesantunan berbahasa Indonesia dalam Sidang Paripurna DPR RI pemilihan paket pimpinan periode 2014-2019 yaitu (1) kesantunan berbahasa, (2) Prinsip kesantunan Leech, (3) Efek ketidaksantunan berbahasa Indonesia, (4) Wujud kesantunan berbahasa (5) Sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019, dan (6) penelitian sebelumnya yang relevan.

2.1 Kesantunan Berbahasa

Kesantunan adalah hukum yang dibuat manusia dalam berkomunikasi. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu dalam berperilaku sosial. Dalam menyampaikan informasi, seseorang harus memperhatikan atau tunduk pada norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat tempat ia hidup. Jika tatacara berkomunikasi seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya yang ditaati atau dipatuhi, maka orang tersebut akan mendapat nilai negatif dari orang lain, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradab, bahkan tidak berbudaya.

Ketidaksantunan berbahasa memiliki kriteria-kriteria kesantunan yang harus ditaati oleh para peserta pertuturan. Kriteria-kriteria tersebut membimbing para peserta pertuturan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, yang terhindar dari kesalahpahaman, dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Banyak para ahli yang mencoba menjelaskan kriteria-kriteria kesantunan dalam berkomunikasi dengan cara menuliskan teori kesantunan berbahasa.

Brown dan Levinson (dalam Murni, 2009) membuat kriteria kesantunan berdasarkan wajah positif dan wajah negatif para peserta pertuturan. Wajah positif adalah keinginan seseorang yang ingin segala atribut-atribut sosial yang melekat dalam dirinya, seperti prestasi, kepemilikan, harta kekayaan, gagasan, dan

sebagainya, mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak dari orang lain. Wajah negatif adalah keinginan seseorang untuk tidak diganggu karena setiap individu memiliki kebebasan untuk bergerak, berbicara, dan akan senantiasa berupaya melindungi kebebasan dan hak-haknya itu. Berdasarkan kriteria kesantunan tersebut, Brown dan Levinson berusaha untuk menjunjung tinggi hak seseorang di dalam proses pertuturan sehingga terkesan sangat individualistik. Kriteria kesantunan tersebut kurang cocok diterapkan dalam budaya timur, khususnya masyarakat Indonesia, yang lebih mementingkan hak kelompok daripada hak individu. Sependapat dengan Brown dan Levinson, Goffman (dalam Aziz, 2012) juga membuat kriteria kesantunan berdasarkan hak-hak para peserta pertuturan. Menurut Goffman, jika tatanan sosial ingin dipertahankan secara proporsional, maka setiap orang harus menghormati hak-hak orang lain seperti halnya mereka mempertahankan hak-haknya sendiri. Goffman mencetuskan teori wajah yang menawarkan dua jenis strategi kesantunan yang bisa diterapkan oleh seseorang. Strategi yang pertama adalah melalui strategi menghindar. Strategi ini dapat diterapkan sebelum sebuah peristiwa yang mengancam wajah benar-benar terjadi. Hal ini ditujukan untuk menjaga agar wajah atau hak orang lain tidak ternodai. Strategi yang kedua adalah melalui strategi perbaikan. Strategi ini dapat diterapkan sesudah sebuah peristiwa terjadi. Hal ini ditujukan untuk menyelamatkan wajah atau hak orang lain yang sudah ternodai. Kedua strategi yang ditawarkan oleh Goffman kurang lengkap karena tidak adanya strategi yang menawarkan bentuk kesantunan yang dapat dilakukan seseorang pada saat terjadinya interaksi komunikasi.

2.2 Prinsip Kesantunan Leech

Leech (1993: 206) merumuskan kriteria kesantunan kedalam prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan tersebut dijabarkan menjadi 6 maksim yang terdiri maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.

2.2.1 Maksim Kearifan

Maksim kearifan menuntut penutur harus meminimalkan atau mengurangi kerugian bagi orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain (Leech, 1993:206). Maksim kearifan menjelaskan tingkat kesantunan berdasarkan untung-rugi terhadap orang lain. Contoh (1) sampai dengan (5) memiliki tingkat kesantunan yang berbeda. Tuturan dengan nomor kecil memiliki tingkat kesantunan yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesantunan dengan nomor yang lebih besar.

(1) Datang ke rumah saya!

(2) Silakan datang ke rumah saya!

(3) saya berharap anda berkenan datang ke rumah saya.

(4) sudilah kiranya datang ke rumah saya?

(5) kalau anda tidak keberatan, sudilah datang ke rumah saya?

Berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan bahwa:

- a. tuturan yang diutarakan secara tidak langsung, lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. Pada tuturan (5), penutur bertutur secara tak langsung dengan cara memberikan kebebasan atau pilihan kepada mitra tutur untuk memilih tindakan yang dimaksudkan, yaitu datang ke rumah penutur. Hal tersebut dipandang lebih santun daripada menyuruh secara langsung seperti pada tuturan (1). Hal tersebut dikarenakan dengan memberikan pilihan, mitra tutur terkesan tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Selain itu, dengan memberikan pilihan, mitra tutur akan semakin mudah untuk mengatakan tidak kepada penutur.
- b. Memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibanding dengan kalimat perintah (imperatif). Dengan menggunakan bentuk imperatif, seperti pada tuturan (1), menyebabkan mitra tutur tidak mempunyai pilihan selain menaati perintah penutur. Hal tersebut melanggar kebebasan dan hak mitra tutur dalam melakukan sesuatu.

2.2.2 Maksim Kedermawanan

Maksim kederamawanan menghendaki setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri, atau memaksimalkan pengorbanan diri sendiri (Leech, 1993: 206). Maksim kederamawanan memiliki kesamaan dengan maksim kearifan yaitu sama-sama menjelaskan tingkat kesantunan berdasarkan untung - rugi. Namun, maksim kederamawanan menjelaskan tingkat kesantunan terhadap diri sendiri.

Contoh:

(6) Pinjami saya mobilmu!

(7) Ajaklah saya ke bali!

(8) Saya akan meminjamkan mobil saya kepada anda.

(9) Saya ingin mengajak anda berlibur ke Bali.

Tuturan (6) dan (7) dipandang kurang santun karena penutur berusaha memaksimalkan keuntungan bagi dirinya dengan menyuruh (terkesan memaksa) mitra tutur untuk berbuat sesuatu untuk penutur. Hal tersebut berbeda dengan tuturan (8) dan (9) yang terkesan santun karena penutur berusaha memaksimalkan kerugian diri sendiri dengan melakukan sesuatu untuk mitra tutur.

2.2.3 Maksim Pujian

Maksim pujian menuntut setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan cacian pada orang lain, atau memaksimalkan pujian pada orang lain (Leech, 1993: 207). Maksim pujian menjelaskan tingkat kesantunan berdasarkan baik-tidaknya penilaian terhadap orang lain.

Contoh:

(10) A: sepeda motormu bagus sekali. Pasti kamu orang kaya.

B: tidak ini sepeda motor bekas. Belinya pun kredit

(11) A: sepeda motormu bagus sekali. Pasti kamu orang kaya.

B : iya dong. Ini sepeda motor mahal. Saya masih punya 10 lagi.

Penutur A pada tuturan (10) dan (11), sudah memenuhi maksim pujian dengan memaksimalkan pujian pada mitra tutur. Namun penutur B (11B) melanggar maksim pujian dengan memaksimalkan pujian pada diri sendiri. Dengan kata lain,

penutur B (10) lebih santun daripada penutur B (11) karena tidak memaksimalkan pujian bagi dirinya.

2.2.4 Maksim kerendahan hati

Maksim kerendahan hati menuntut peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri (Leech, 1993:206). Maksim kerendahan hati berpusat pada diri sendiri.

Contoh:

(12) A: Betapa pandainya orang itu.
B: Ya, dia memang pandai.

(13) A: Kamu sangat pandai.
B: Ya, saya memang pandai.

Pertuturan (12) mematuhi prinsip kesantunan karena penutur A memuji kebaikan pihak lain dan tanggapan yang diberikan oleh penutur B juga memuji pihak lain. Pada tuturan (13) itu, mitra tutur (13B) tidak mematuhi maksim kerendahan hati karena memaksimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Masalah yang sama juga terdapat pada pertuturan (14) berikut.

(14) A: Kamu memang sangat berani.
B: Ya memang, semua orang juga bilang kalau saya pemberani.

Agar komentar (14B) pada tuturan (14) serasa santun, maka (14B) dapat menjawab seperti pada tuturan (15) berikut ini, sehingga terkesan penutur (14B) meminimalkan rasa hormat bagi dirinya sendiri.

(15) A: Kamu memang sangat berani.
B : Ah tidak, tadi kan hanya kebetulan saja.

2.2.5 Maksim kesepakatan

Maksim kesepakatan menghendaki agar setiap penutur dan mitra tutur memaksimalkan kesetujuan di antara mereka dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka (Leech, 1993:207).

Contoh:

(16) A : Barcelona adalah tim terbaik saat ini.
B : Ya, memang!

- (17) A : Barcelona adalah tim terbaik saat ini.
 B : Tidak, kata siapa? lawan Glosgow Celtic saja kalah.

Tuturan (16B) lebih santun dibanding dengan tuturan (17B) karena pada tuturan (17B), penutur memaksimalkan ketidaksetujuan dengan pernyataan A. Namun, bukan berarti setiap orang harus senantiasa setuju dengan pendapat atau pernyataan yang mengandung ketidaksetujuan parsial seperti tampak pada pertuturan (18) berikut.

- (18) A : Barcelona adalah tim terbaik saat ini.
 B : Iya memang, tetapi saat melawan tim-tim lemah, terkadang Barcelona terlalu menganggap remeh sehingga kehilangan konsentrasi.

Pada pertuturan (18B) terasa lebih santun daripada pertuturan (17B) karena ketidaksetujuan B dinyatakan secara total, tetapi secara parsial sehingga tidak terkesan bahwa penutur adalah orang yang sombong.

2.2.6 Maksim Simpati

Maksim simpati mengharuskan semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada mitra tuturnya (Leech, 1993:207). Bila mitra tutur memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan penutur wajib memberikan ucapan selamat. Jika mitra tutur mendapatkan kesulitan atau musibah, maka sudah sepantasnya penutur menyampaikan rasa duka atau bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian. Tuturan (19) dan (20) cukup santun karena penutur mematuhi maksim simpati, yakni memaksimalkan rasa simpati kepada mitra tutur yang mendapatkan kebahagiaan pada (19) dan kedudukan pada (20)

- (19) A : Saya mempunyai sepeda motor baru.
 B : Selamat ya, sepeda motormu sungguh bagus.
 (20) A : Saya sedih karena nenek saya meninggal dunia.
 B : Oh, saya turut prihatin. Semoga amalnya diterima di sisiNya.

Perbedaan terdapat pada tuturan (21) yang melanggar maksim simpati.

- (21) A : Saya mempunyai sepeda motor baru.
 B : Sepeda motor Bayu masih lebih bagus daripada sepeda motormu.

Penutur (21B) meminimalkan rasa simpati terhadap mitra tutur. Penutur (21B) meminimalkan rasa simpati terhadap mitra tutur yang sedang mendapat kebahagiaan karena mempunyai sepeda motor baru. Penutur (21B) menganggap bahwa sepeda motor Bayu lebih bagus daripada sepeda motor penutur (21A). Penutur (21B) terkesan tidak senang atau menunjukkan sikap antipati terhadap penutur (21A) yang mempunyai sepeda motor baru.

Kriteria kesantunan dari keenam maksim tersebut mudah dipahami dan ditaati dalam proses pertuturan. Namun, Leech mengingatkan bahwa keenam maksim tersebut dapat ditaati sampai batas-batas tertentu dan tidak ditaati sebagai kriteria kesantunan yang absolut. Kriteria kesantunan tersebut bergantung terhadap latar sosial dan konteks tuturan. Leech berpendapat bahwa kriteria kesantunan yang dinyatakan oleh seorang penutur akan sangat ditentukan situasi saat berlangsungnya pertuturan sehingga kriteria kesantunan tersebut akan berbeda pada setiap latar sosial pertuturan.

Leech membedakan kesantunan menjadi kesantunan mutlak dan kesantunan relatif (Leech, 1993: 126). Kesantunan relatif adalah kesantunan yang ditunjukkan pada situasi - situasi tertentu, misalnya seperti ungkapan "*tolong diam*" tidaklah mesti dipandang sebagai bentuk yang kurang santun dari pada bentuk "*bisakah anda diam?*" hal tersebut bisa terjadi tergantung konteks tuturan dan cara penutur bertutur. Sementara itu, kesantunan mutlak dipandang sebagai sebuah ukuran yang memiliki kutub positif dan negatif. Pada kutub negatif ada kesantunan negatif berupa cara untuk mengurangi tingkat kesantunan di dalam pertuturan. Sementara itu pada kutub positif berupa cara untuk memaksimalkan tingkat kesantunan di dalam pertuturan.

Leech juga berpendapat bahwa tingkat kesantunan juga dipengaruhi oleh hak dan kewajiban para peserta pertuturan. Leech (1993: 204) membuktikan pernyataannya dengan melalui contoh dari Jenifer Thomas berikut.

“Andai seorang penumpang meminta kepada sopir supaya berhenti di sebuah pemberhentian bis. Tindak ujar ini tak membutuhkan banyak sopan santun karena memang menjadi pekerjaan sopir untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di pemberhentian bis. Namun andaikan penumpang meminta kepada sopir agar berhenti di muka rumah penumpang yang tidak ada

pemberhentian bisnya. Dalam hal ini penumpang membutuhkan banyak sopan santun dan perilaku lainnya seperti minta maaf dan memberi penjelasan”.

Contoh di atas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban juga berpengaruh terhadap tingkat kesantunan. Penumpang yang menyuruh sopir untuk berhenti di halte bus masih dianggap santun karena sudah merupakan tugas dan kewajiban sopir bus. Namun, akan menjadi tidak santun jika penumpang tersebut menyuruh sopir bus untuk berhenti di depan rumah yang tidak memiliki halte bus.

2.3 Efek Ketidaksantun Berbahasa Indonesia

Efek ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam hal ini adalah akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tutur yang tidak santun dalam sidang paripurna DPR RI. Berikut penjelasan masing-masing mengenai efek ketidaksantunan berbahasa Indonesia sebagai berikut.

2.3.1 Efek Pengabaian Tidak Merespon

Efek pengabaian tidak merespon adalah suatu kondisi tidak menghiraukan lawan tutur atau tidak acuh pada pendapat, gagasan dan argumen orang lain. Penutur merasa apa yang telah ia tuturkan sudah benar sehingga tidak perlu lagi untuk disanggah atau dikomentari.

2.3.2 Efek Mendebat

Efek mendebat adalah suatu kondisi ketika lawan tutur atau pihak ke tiga menyanggah atau mengomentari apa yang dituturkan oleh penutur dan petutur. Sehingga menimbulkan efek mendebat di dalam suatu forum tersebut. Biasanya efek mendebat tersebut terjadi bukan hanya dua arah saja artinya, bisa antara penutur dan bisa juga antara pihak ke tiga yaitu antara rekan penutur maupun petutur.

2.3.4 Efek Pengolok-olokan

Efek pengolok-olokan adalah suatu kondisi di dalam forum diskusi atau forum formal lainnya yang tidak etis dilakukan oleh peserta forum diskusi karena, tujuannya jelas pengolok-olokan tersebut adalah menjatuhkan atau menjelek-jelekkan lawan tutur. Efek pengolok-olokkan biasanya terjadi karena kurang setuju atau bisa juga tidak puas dengan keputusan yang diambil dalam suatu forum diskusi.

2.3.4 Efek Memprotes

Efek memprotes hampir sama dengan efek mendebat hanya saja yang membedakannya adalah dalam efek mendebata penutur dan petutur terlibat dalam suatu perdebatan atau saling beradu argumen, pertuturannya dua arah. Akan tetapi, dalam efek memprotes pertuturannya tidak selalu dua arah, petutur pada waktu memprotes apa yang disampaikan oleh penutur bisa saja tidak menanggapinya.

2.4 Wujud Kesantunan Berbahasa

Wujud kesantunan berbahasa dapat diketahui dari bentuk pemarkah kesantunan berbahasa secara verbal maupun nonverbal. Bentuk kesantunan berbahasa secara verbal dapat diketahui berdasarkan penggunaan bahasa di dalam proses pertuturan. Namun, bentuk kesantunan berbahasa secara nonverbal dapat dikaji menggunakan teori peristiwa tutur dan konteks tutur.

2.4.1 Peristiwa Tutur

Peristiwa tutur adalah peristiwa sosial dalam interaksi antara penutur dengan mitra tutur dalam situasi tertentu untuk menyampaikan gagasan atau tujuan tertentu. Penyampaian gagasan atau tujuan dalam peristiwa tutur dapat dilakukan secara eksplisit maupun implisit, artinya maksud yang disampaikan secara terang-terangan dan ada pula maksud tersirat dalam sebuah tuturan. Yule (2006: 99) berpendapat bahwa “ peristiwa tutur merupakan suatu kejadian saat

para peserta pertuturan berinteraksi dengan bahasa dalam cara-cara konvensional untuk mendapat suatu hasil”.

Dalam suatu peristiwa tutur, peran penutur dan mitra tutur dapat berganti-berganti. Pihak yang tadinya menjadi pendengar atau mitra tutur, sesudah mendengar dan memahami ujaran yang diucapkan oleh penutur akan segera bereaksi melakukan tindak tutur, sebagai pembicara atau penutur berubah kini menjadi pendengar atau mitra tutur.

“Menurut Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2004:48-49) mengemukakan suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen yang bila huruf pertamanya dirangkai menjadi akronim SPEAKING. Kedelapan komponen itu adalah:

- S : *Setting and Scene*; tempat dan suasana tindak tutur dilakukan.
- P : *Participant*; para peserta tutur yaitu penutur dan mitra tutur.
- E : *End*; tujuan tindak tutur.
- A : *Act*; suatu peristiwa dimana seorang penutur sedang mempergunakan kesempatan bertuturnya
- K : *Key*; nada suara dan ragam bahasa yang dipergunakan dalam menyampaikan dan cara mengemukakan tindak tutur.
- I : *Instrument*; alat untuk menyampaikan tuturan, misalnya secara lisan, tertulis, lewat telepon, dan sebagainya.
- N : *Norm*; permainan yang mesti ditaati oleh setiap peserta tindak tutur.
- G : *Genre*; jenis kegiatan yang mempunyai sifat-sifat lain dari jenis kegiatan.

Keseluruhan komponen serta peranan komponen-komponen tutur yang dikemukakan Hymes dalam sebuah peristiwa bahasa itulah yang disebut dengan peristiwa tutur. Pada dasarnya peristiwa tutur merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu ujaran.

2.4.2 Konteks Tutur

Konteks tutur mempunyai fungsi vital karena merupakan penentu makna suatu tuturan. Konteks tutur merupakan hal-hal yang mendukung untuk memaknai suatu tuturan. Tarigan (1990: 35) menyatakan bahwa konteks tuturan merupakan

latar belakang pengetahuan yang diperkirakan dimiliki dan disetujui bersama oleh pembicara atau penulis dan penyimak atau pembaca serta menunjang interpretasi penyimak terhadap apa yang dimaksud pembicara dengan suatu ucapan tertentu.

Unsur teks dan konteks dapat ditemukan dalam kegiatan berbahasa atau interaksi verbal. Kridalaksana (dalam Kusnadi, 2005: 37) menyatakan bahwa teks berarti wacana, bentuk bahasa tertulis, naskah, atau satuan bahasa terlengkap yang bersifat abstrak. Konteks adalah lingkungan nonlinguistik dari wacana atau semua faktor dalam komunikasi yang tidak menjadi bagian dari wacana.

Paret (dalam Andianto, 2010: 35-36) membedakan konteks tutur menjadi lima macam, yaitu: a) konteks kontekstual; b) konteks eksistensial; c) konteks situasional; d) konteks aksional; dan e) konteks psikologis.

- a) Konteks kontekstual adalah konteks yang berupa konteks, yakni perluasan cakupan tuturan seseorang yang menghasilkan teks” (Mey dalam Andianto 2010: 35). Konteks merupakan bagian dari medan wacanan (*the domain of discourse*), yang di dalamnya ada orang-orang, tempat-tempat, wujud-wujud, peristiwa-peristiwa, fakta-fakta, dan sebagainya, yang telah disebutkan dalam percakapan sebelumnya (dan atau sesudahnya) sebagai latar yang menentukan luas konteks untuk memahami maksud suatu tuturan.
- b) Konteks eksistensial adalah partisipan (orang), waktu, dan tempat yang mengiringi tuturan, misalnya siapa yang menuturkan dan kepada siapa dituturkan itu ditujukan, kapan, dan dimana tempatnya.
- c) Konteks situasional adalah jenis faktor penentu kerangka sosial institusi yang luas dan umum, seperti pengadilan, rumah sakit, ruang kelas, atau latar kehidupan sehari-hari, misalnya pasar, ladang, dan lain-lain, yang memiliki kebiasaan dan atau percakapan khas.
- d) Konteks aksional adalah tindakan, aksi, atau perilaku-perilaku nonverbal yang menyertai penuturan, misalnya menarik nafas dalam-dalam, menatap, membusungkan dada, dan lain-lain.
- e) Konteks psikologis adalah situasi psikis dan mental yang menyertai penuturan, seperti marah, gembira, bersemangat, dan sebagainya.

2.5 Rapat Paripurna DPR RI Periode 2014-2019

Rapat Paripurna DPR RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR. Rapat paripurna yang mengagendakan pemilihan paket pimpinan DPR RI untuk periode 2014-2019 sempat diwarnai kericuhan, menyita perhatian masyarakat Indonesia. Berbagai media massa, media cetak, dan media elektronik ramai meliput dan memberitakan kepada masyarakat di negeri ini sehingga dapat menyaksikan proses pertuturan yang terdapat di dalamnya. Wajar saja jika kericuhan sidang paripurna DPR RI menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat karena menyangkut masalah yang sensitif apalagi yang ricuh di Senayan adalah dua kelompok yang baru saja berkompetisi di dalam pemilihan presiden republik Indonesia untuk periode 2014-2019, yakni dari kelompok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan kelompok Koalisi Merah Putih (KMP).

2.6 Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan kesantuna berbahasa juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Siti Masruroh dengan judul *Strategi Kesantunan Berbahasa Indonesia dalam Interaksi Jual Beli antara Pedagang dengan Pembeli di Lingkungan Kampus*. Hasil yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah (1) wujud kesantuna berbahasa pedagang kaki lima dan pembeli; (2) strategi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dan pembeli dalam menerapkan kesantunan berbahasa.

Penelitian yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Agus Santoso dengan judul *Realisasi Kesantunan Berbahasa dalam Peristiwa Tutur Tawar Menawar di Pasar Tanjung Jember*. Analisis kesantunan berbahasa pada penelitian ini menggunakan teori kesantunan berbahasa Leech. Hasil dari analisis data ditemukan kesantunan dalam bentuk (1) realisasi maksim kearifan; (2) realisasi maksim kedermawanan; (3) realisasi maksim pujian; (4) realisasi maksim kerendahan hati; (5) realisasi maksim kesepakatan.

Penelitian yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Setiyani Qur'ana Sakti dengan judul *Realisasi Kesantunan Berbahasa dalam Komuniiasi Antarwarga Masyarakat Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*. Hasil dari analisi data ditemukan kesantunan dalam bentuk (1) realisasi kesantunan berbahasa yang meliputi (a) kesantunan dalam menjawab pertanyaan, (b) kesantunan dalam memerintah, (c) kesantunan dalam bertanya, (d) kesantunan dalam menjelaskan, (e) kesantunan dalam menyapa, (f) kesantunan dalam menawar, dan (g) kesantunan dalam menolak, (2) Strategi kesantunan berbahasa yang meliputi (a) strategi formal, (b) strategi formal kontekstual, (c) strategi formal-tindak tutur tak langsung, dan (d) strategi formal-kontekstual-tindak tutur-tak langsung, (3) stratifikasi kesantunan berbahasa yang meliputi (a) ngoko, (b) madya, (c) krama.

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang kesantunan berbahasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menekankan bentuk-bentuk tuturan tidak santun yang melanggar prinsip kesantunan Leech. Juga dampak yang ditimbulkan dari tuturan tidak santun dalam persidangan Paripurna DPR RI. Selain itu, objek penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Sidang paripurna DPR RI periode 2014-2019. Objek penelitian ini memiliki kriteria kesantunan yang berbeda dengan kriteria kesantunan yang ada pada objek penelitian sebelumnya.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian yang meliputi: (1) rancangan penelitian; (2) data dan sumber data penelitian; (3) metode pengumpulan data; (4) metode analisis data; (5) instrumen penelitian; dan (6) prosedur penelitian. Keenam hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan kegiatan perencanaan sebelum melakukan penelitian. Kegiatan perencanaan tersebut mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan. Moleong (2012:385) berpendapat bahwa rancangan penelitian diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Hal tersebut didasarkan pada jenis data penelitian dan teknik analisis data yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:3) mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan rancangan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti memilih metode deskriptif kualitatif ini untuk mengatasi permasalahan penggunaan bahasa dalam masyarakat yang terus bermunculan. Agar tujuan masalah dalam penelitian ini tersampaikan dengan baik, maka peneliti melibatkan disiplin ilmu yang mutlak diperlukan. Metode ini pun sangat cocok dengan data yang akan diteliti karena data tidak berupa angka tetapi berupa tuturan atau pernyataan-pernyataan seperti dalam penggunaan bahasa yang selalu terkait dengan konteks pemakaiannya. Oleh karena itu, pengkajian masalah ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini berusaha menggambarkan sekaligus menginterpretasikan fenomena kebahasaan yang terjadi khususnya, menganalisis peristiwa tutur dalam sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019.

3.2 Data dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berupa segmen-segmen tutur serta konteks penggunaannya yang mengindikasikan tindak tutur tidak santun dalam peristiwa tutur sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Peristiwa pertuturan tersebut terjadi antara pimpinan DPR dengan seluruh ketua fraksi partai politik, pimpinan DPR dengan fraksi partai dari koalisi Indonesia Hebat, pimpinan DPR dengan fraksi partai dari koalisi merah putih, anggota dewan dengan anggota dewan yang lain. Data segmen tutur yang tidak santun diklasifikasikan berdasarkan pelanggaran terhadap keenam maksim dalam prinsip kesantunan Leech yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati, maksim pujian, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.

Sumber data penelitian berupa peristiwa tutur dari sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019 yang diunduh dari *youtube*. Beberapa cuplikan video tersebut berasal dari laman:

- a. <https://www.youtube.com/watch?v=XmJVk...>

Cuplikan video ini berisi keributan sidang Paripurna yang mengagendakan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014-2019, keributan disebabkan oleh pertentangan antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih, seluruh fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat tidak bisa menerima keputusan *voting* yang dilakukan oleh pimpinan sidang sementara.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode observasi melalui teknik simak catat yang digunakan sebagai metode pengumpulan data. Berikut langkah-langkah dalam proses pengumpulan data.

- a. Proses pengumpulan data dimulai dari proses transkrip dengan mencatat seluruh tindak tutur yang ada dalam video sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Proses transkrip dilakukan untuk menyalin data berupa tuturan lisan menjadi tulisan agar mempermudah peneliti dalam memilah data berupa segmen tutur.

b. Setelah melakukan proses transkrip, peneliti memilah data berupa tindak tutur dalam sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019 yang diindikasikan tidak santun. Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan pelanggaran terhadap keenam maksim Leech. Keenam maksim tersebut yaitu:

- 1) Maksim kearifan
- 2) Maksim kedermawanan
- 3) Maksim kerendahan hati
- 4) maksim pujian
- 5) maksim kesepakatan
- 6) maksim simpati

Keenam maksim Leech tersebut disesuaikan dengan tata tertib/ peraturan yang berlaku di dalam sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Hal tersebut disebabkan tingkat kesantunan di dalam persidangan mengacu pada tata tertib sidang yang berlaku.

c. Data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan keenam maksim Leech kemudian diklasifikasikan kembali berdasarkan efek yang ditimbulkan dari ketidaksantunan tindak tutur yang melanggar prinsip kesantunan Leech dalam sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019.

3.4 Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:337), analisis data kualitatif terdiri dari tiga proses kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

Tahap reduksi data dalam penelitian ini yaitu proses pemilihan data berupa segmen tutur tidak santun yang terdapat dalam sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan pelanggaran terhadap keenam maksim dalam prinsip kesantunan Leech yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati, maksim pujian, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan keenam maksim Leech tersebut kemudian diklasifikasikan kembali berdasarkan efek yang ditimbulkan dalam persidangan dari segmen tutur tidak santun yang melanggar prinsip kesantunan Leech dalam sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penataan data yang telah diseleksi dan diklasifikasikan ke dalam kode agar lebih mudah dianalisis. Pengodean didasarkan pada para penutur yang terdapat dalam persidangan. Berikut teknik pengodean yang digunakan dalam penelitian ini.

- 1) PS : Pimpinan Sidang
- 2) F-PDI : Fraksi partai Demokrasi Indonesia (Rieke Diah Pitaloka)
- 3) F- H : Fraksi Partai Hanura
- 4) F- P : Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB)
- 5) KIH : Koalisi Indonesia Hebat
- 6) KMP : Koalisi Merah Putih

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap analisis data kualitatif yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, kesimpulan dapat diambil selama proses analisis data dan diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Data yang sudah dianalisis, diklasifikasikan dan disajikan, selanjutnya dapat disimpulkan oleh peneliti. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara berulang-ulang, mempelajari kajian yang berhubungan dengan penelitian, dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin signifikansi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini diambil dari

proses analisis data tindak tutur yang tidak santun yang telah melalui proses pengklasifikasian berdasarkan prinsip kesantunan Leech.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan sebagai pegangan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang telah ditemukan sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama (Moleong, 2012:9). Hal ini disebabkan peneliti dalam penelitian kualitatif dipandang sebagai pencari tahu alami dalam pengumpul data.

Selain peneliti sebagai instrumen utama, instrumen bantu juga digunakan di dalam penelitian ini. Instrumen bantu tersebut yaitu laptop sebagai alat pemutar video dan sebagai alat pencatat data berupa tindak tutur yang ada dalam sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Instrumen tambahan berupa tabel pengumpul data dan tabel pemandu analisis data juga digunakan sebagai instrumen tambahan. Tabel pengumpul data digunakan untuk mengumpulkan data berupa segmen tutur yang tidak santun yang terdapat dalam sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Setelah data terkumpul, data tersebut dikelompokkan berdasarkan keenam maksim Leech agar nantinya mudah untuk dianalisis. Tabel pemandu analisis data digunakan untuk menganalisis data yang sudah dikelompokkan dalam tabel pengumpul data.

3.6 Prosedur Penelitian

Secara garis besar, prosedur penelitian meliputi tiga tahapan, yaitu :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan penelitian dimulai dari pemilihan judul penelitian. Judul yang sudah dipilih kemudian disahkan oleh ketua program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia dan ketua Jurusan Bahasa dan Seni. Setelah disahkan, barulah peneliti menyusun proposal skripsi yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka yang relevan dengan judul

penelitian, dan metodologi penelitian. Selama penyusunan proposal skripsi, peneliti terus melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengumpulan data berupa tuturan yang tidak santun dalam sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019 dilakukan pada tahap pelaksanaan. Setelah data terkumpul, barulah dilakukan analisis data berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori kesantunan Leech. Setelah menganalisis data, kegiatan selanjutnya adalah penyimpulan hasil penelitian.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan pertama adalah penyusunan laporan penelitian tentang ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Setelah laporan penelitian selesai disusun dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan II, laporan tersebut dipertanggungjawabkan di depan dosen pembimbing I dan II, dosen pembahas, dan dosen penguji. Laporan penelitian yang sudah dipertanggungjawabkan kemudian direvisi untuk menyempurnakan laporan penelitian tersebut. Setelah direvisi, laporan penelitian tersebut digandakan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan artikel penelitian berdasarkan laporan penelitian tersebut menjadi tahap terakhir dalam tahap penyelesaian ini.